

UPAYA FINLANDIA DALAM MENGATASI *HUMAN TRAFFICKING* TAHUN 2015-2020

Mufidah Rohadatulaisy¹

Abstract: This research was aimed to find out how Finnish Government overcome human trafficking on their country in 2015-2020. Finland is a country of destination and transit for trafficking people, and to some extent also acting as a country of origin. There are several types of human trafficking that happened in Finland such as labour exploitation, sexual exploitation, forced marriage, forced begging and criminality. This research was conducted by using descriptive research with data collection technique through library research. Then, this research used qualitative data analysis as an approachment to analyse data. This research concludes that the Finnish Government efforts to subdue human trafficking in their country through the implementation of The Council of Europe with amendment of the International Protection Act and adopted new Government Action Plan 2016-2017. Then coordination with several parties, like Nordic-Baltic Partnership with Passenger Ferry Companies to Encounter Trafficking in Human Beings on the Baltic Sea", Developing National Mental Health Policies for Refugees (PALOMA), Caring for Trafficked Person in Finland (HOIKU), and coordination with the police and attorney's office, one could say, have not been successful as there had been an increase in number of victims from 2015-2020.

Keywords: Human Trafficking, Finland, Implementation, Coordination

Pendahuluan

Finlandia merupakan salah satu negara yang mendapat predikat sebagai negara paling bahagia di dunia, berdasarkan laporan *United Nations Sustainable Development Solutions Network* Finlandia menyandang predikat tersebut selama empat tahun berturut (Duncen Madden, 2018). Bahkan para imigran yang tinggal di Finlandia sudah menganggap Finlandia sebagai rumah mereka sendiri (John F, Helliwel et.al, 2018). Namun, dengan predikat tersebut tidak menjamin Finlandia terbebas dari masalah *human trafficking*, diketahui bahwa sejak tahun 2012-2020 kasus *human trafficking* di Finlandia terus mengalami peningkatan. *Human trafficking* di Finlandia disebabkan oleh Finlandia merupakan negara sumber dimana para turis mencari pekerja seks anak, selain itu juga Finlandia merupakan negara transit dan tujuan bagi orang-orang yang diperdagangkan. Sedangkan, untuk para imigran yang menjadi korban *human trafficking* disebabkan mereka tidak memiliki keterampilan bahasa dan hutang yang perlu mereka bayarkan kepada pelaku *human trafficking* (GRETA, 2019). Ada beberapa jenis *human trafficking* yang terjadi di Finlandia yaitu eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, Pernikahan paksa, serta kriminal dan mengemis paksa (Ihmiskauppa, 2017).

Ditahun 2015 jumlah pencari suaka dan imigran di Finlandia mengalami peningkatan, terhitung 32.467 jiwa pertahun 2015 yang masuk ke Finlandia (GRETA, 2019). Mereka datang menghindari konflik yang terjadi di negara asal mereka. Hal inilah yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah kasus *human trafficking* di

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: aisy.mufidah@gmail.com.

Finlandia. Korban *human trafficking* di Finlandia mayoritas merupakan migran, mereka teridentifikasi sebagai warga negara Iraq, Somalia, Afghanistan, Nigeria, dan lainnya. Untuk menekan kasus *human trafficking* yang terjadi Pemerintah Finlandia sudah melakukan beberapa upaya diantaranya adalah menandatangani *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings* pada tahun 2006 dan kemudian meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 2012 (Ihmiskauppa, 2020).

Tabel 1. Jumlah Korban Human Trafficking di Finlandia 2012-2020

No.	Tahun	Jumlah Korban
1.	2012	48
2.	2013	65
3.	2014	50
4.	2015	52
5.	2016	130
6.	2017	127
7.	2018	163
8.	2019	229
9.	2020	247

Sumber: *National Assistance System*, 2020.

Finlandia sebagai pihak yang meratifikasi *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings* wajib melakukan laporan terhadap implementasi yang dilakukan negaranya kepada GRETA (*Group of Expert on Action against Trafficking in Human beings*) yang merupakan badan yang tugasnya mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan implementasi dari *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*. Kemudian di tahun 2015 GRETA melakukan evaluasi pertama dari implementasi yang dilakukan Finlandia, dalam evaluasi ini GRETA menemukan bahwa proses identifikasi korban *human trafficking* dalam proses penerimaan orang-orang yang mencari perlindungan internasional tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Finlandia, serta tidak adanya mekanisme rujukan nasional yang menyediakan kerangka kerja sama untuk berbagi informasi dengan berbagai pihak. Selain itu GRETA juga menyadari bahwa data dari jumlah korban *human trafficking* yang disajikan pada saat evaluasi tidak mengungkapkan skala fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan (GRETA, 2015).

Oleh karena itu, pemerintah Finlandia diminta untuk meningkatkan prosedur identifikasi korban *human trafficking*, dengan memperkenalkan mekanisme nasional dan menjamin bahwa dalam praktiknya, proses identifikasi dipisahkan dengan proses investigasi. Selain itu, GRETA juga menilai bahwa perlu adanya usaha dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Finlandia tentang resiko dari *human trafficking* dan hak-hak korban *human trafficking*, terutama kepada para migran.

Kerangka Konsep

Konsep Human Trafficking

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *human trafficking* Cornelius Friesendorf. Menurut Cornelius Friesendorf, *human trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyikan atau menerima orang, melalui ancaman ataupun paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan,

memberi dan menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi (Cornelius Friesendorf, 2009).

Friesendorf mengatakan bahwa untuk menanggulangi human trafficking harus melakukan kemajuan terhadap tiga bidang yaitu, diperlukannya kebijakan implementasi yang lebih sistematis, jaringan pencegahan atau penanggulangan terhadap human trafficking harus lebih tersembunyi dan terkoordinasi dengan baik, kemudian aktor-aktor yang terlibat didalam pencegahan dan penanggulangan human trafficking lebih memberikan perhatiannya terhadap penelitian tentang human trafficking serta melihat dampak yang ditimbulkan dari upaya pencegahan dan penanggulangan. Kemudian dari pelaksanaan tiga bidang tersebut akan ditingkatkan melalui bidang keempat yaitu pembentukan institusi (Cornelius Friesendorf, 2009). Berikut penjelasan dari keempat bidang diatas antara lain:

1. *Implementation*

Implementasi merupakan tindakan di lapangan berdasarkan kebijakan yang sebelumnya telah dibuat, kebijakan harus dilaksanakan dalam praktik nyata agar kita dapat melihat dampak baik dan buruk yang dihasilkan.

2. *Coordination*

Kerjasama diantara para aktor dianggap sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi human trafficking. Kerjasama ini dapat berupa kerjasama internasional, kerjasama antar Non-Governmental Organization (NGOs), ataupun kerjasama antar para aktor di sektor keamanan (polisi, penjaga perbatasan, dll) yang memfokuskan kepada pencegahan dan perlindungan.

3. *Research and Evaluation*

Penyebab dari kasus human trafficking yang terus berkembang salah satunya adalah terdapat kelangkaan data informasi tentang ruang lingkup, jenis, lokasi, oleh karena itu penting untuk melakukan penelitian serta evaluasi terhadap upaya yang dilakukan dalam mencegah *human trafficking*.

4. *Institutionalizing Better Implementation, Networking, and Evaluation*

Implementasi, kerjasama, penelitian, dan evaluasi akan sempurna jika dibentuknya institusi khusus yang berperan mengurangi masalah dalam kerjasama dengan memfasilitasi dan berbagi informasi dengan berbagai pihak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, serta sumber data yang berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka, yang kemudian untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Setiap tahunnya korban human trafficking di Finlandia mayoritas merupakan para migran sekitar 60%-70% dari jumlah keseluruhan korban, sedangkan korban yang merupakan Warga Negara Finlandia hanya sekitar 34%-40% (Ihmiskauppa, 2017). Pemerintah melaporkan bahwa korban yang merupakan pencari suaka dan migran Sebagian besar telah dieksploitasi bahkan sebelum kedatangan mereka di Finlandia.

Eksplotasi Tenaga Kerja di Finlandia Tahun 2015-2020

Eksplotasi tenaga kerja merupakan bentuk perdagangan manusia yang sering terjadi di Finlandia setelah eksploitasi seksual, dan mayoritas yang menjadi korban eksploitasi tenaga kerja ini merupakan migran. Kesulitan mendapatkan pekerjaan di negara asal, serta prospek dari pekerjaan di Finlandia yang membayar lebih untuk pekerjaan yang sama di negara asal menjadi alasan utama para migran mencari pekerjaan di Finlandia (Ollus, N, et al., 2013).

Tabel 1. Jumlah Korban Eksploitasi Tenaga Kerja di Finlandia Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Jumlah Korban
1.	2015	27
2.	2016	61
3.	2017	33
4.	2018	20
5.	2019	76
6.	2020	122

Sumber: *Annual Report* Tahun 2015-2020

Eksplotasi Seksual di Finlandia Tahun 2015-2020

Eksplotasi seksual merupakan jenis human trafficking yang paling sering ditemukan di Finlandia, dapat dilihat dari laporan tahunan assistance system terkait jumlah korban eksploitasi seksual, namun dari data yang tersedia tidak mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Sebagian besar korban yang diidentifikasi di Finlandia telah menjadi korban bahkan sebelum mereka datang ke Finlandia.

Tabel 2. Jumlah Korban Eksploitasi Seksual di Finlandia Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Jumlah Korban
1.	2015	18
2.	2016	45
3.	2017	46
4.	2018	65
5.	2019	81
6.	2020	62

Sumber: *Annual Report* Tahun 2015-2020

Pernikahan Paksa di Finlandia Tahun 2015-2020

Di Finlandia pernikahan paksa telah dikategorikan sebagai bentuk dari human trafficking, pernikahan paksa juga merupakan masalah terkini di Finlandia, sejak Maret 2015 terjadi peningkatan kasus pernikahan paksa yang melibatkan warga negara asing (GRETA, 2018).

Tabel 3. Jumlah Korban Pernikahan Paksa di Finlandia Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Jumlah Korban
1.	2015	0
2.	2016	0
3.	2017	6
4.	2018	63
5.	2019	52
6.	2020	45

Sumber: *Annual Report* Tahun 2015-2020

Kriminal dan Mengemis Paksa di Finlandia Tahun 2015-2020

Pemerintah Finlandia mengkategorikan kriminal dan mengemis paksa sebagai salah satu bentuk human trafficking, korban dari bentuk human trafficking ini sangat jarang ditemukan di Finlandia. Hal ini juga bisa disebabkan oleh korban yang takut untuk menceritakan hal yang dialaminya, sehingga pihak berwenang juga tidak bisa mengidentifikasi mereka sebagai korban human trafficking (GRETA, 2018).

Tabel 4. Jumlah Korban Kriminal dan Mengemis Paksa di Finlandia 2015-2020

No.	Tahun	Jumlah Korban
1.	2015	0
2.	2016	0
3.	2017	0
4.	2018	0
5.	2019	6
6.	2020	9

Sumber: *Annual Report* Tahun 2015-2020

Untuk mengatasi masalah *human trafficking* di negaranya maka Finlandia melakukan beberapa upaya diantaranya:

1. Amandemen *International Protection Act*

Pada evaluasi pertama yang dilakukan GRETA pada tahun 2015, ditemukan bahwa proses identifikasi korban *human trafficking* dalam proses penerimaan orang-orang yang mencari perlindungan internasional tidak diatur dalam UU Finlandia, sehingga ditahun yang sama Finlandia melakukan amandemen pada Bab 38 dari *International Protection Act*, Amandemen ini mulai berlaku pada 1 Juli 2015. Amandemen ini dilakukan juga sebagai bentuk implementasi dari *The Convention on Action Against Trafficking in Human Beings* yang diratifikasi Finlandia pada tahun 2012. Setelah amandemen dilakukan maka "Polisi, penjaga perbatasan, layanan imigrasi, dan *assistance system* dapat secara resmi mengidentifikasi korban *human*

trafficking. Selain itu otoritas yang bersangkutan dapat memberikan sistem bantuan dan waktu untuk proses pemulihan.” (GRETA, 2019).

2. Nordic-Baltic Partnership with Passenger Ferry Companies to Encounter Trafficking in Human Being on The Baltic Sea 2016

Pada tahun 2016 Finlandia ikut berpartisipasi dalam kerjasama regional Nordic-Baltic yang berjudul “*Nordic-Baltic Partnership with Passenger Ferry Companies to Encounter Trafficking in Human Beings on the Baltic Sea*” sebagai upaya dalam mengatasi *human trafficking* yang terjadi di negaranya, beberapa korban *human trafficking* masuk ke Finlandia lewat jalur laut yang dimana mereka menggunakan kapal-kapal kecil termasuk kapal ferry baik legal maupun ilegal. Dengan keikutsertaan Finlandia dalam kerjasama regional ini adalah untuk mengontrol keluar masuknya korban *human trafficking* dengan mengetahui kondisi wilayah di Kawasan Nordik-Baltik. Kerjasama regional ini dikoordinir oleh IOM dan *Helsinki-based European Institute for Crime Prevention and Control* (HEUNI). Berdasarkan laporan HEUNI bahwa pencegahan *human trafficking* belum menjadi prioritas oleh perusahaan-perusahaan ferry terkhusus di wilayah Laut Baltik. Dari laporan tersebut maka kerjasama ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana *human trafficking* berkaitan dengan industri ferry, serta melihat apa yang telah diketahui oleh staff ferry tentang *human trafficking* (GRETA, 2018).

Dalam mencapai tujuan tersebut maka pelatihan maupun panduan terhadap para pekerja kapal ferry atau penyebrangan sangat diperlukan, oleh karena itu dalam kerjasama ini IOM Finlandia membuat materi pembelajaran bagi pekerja dan penumpang kapal ferry yang berisi tentang identifikasi dini dan pendampingan korban *human trafficking*. Selain itu IOM Finlandia juga menyelenggarakan serangkaian pelatihan bagi para staf ferry untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang *human trafficking*, penyelundupan migran, serta meningkatkan kapasitas mereka untuk mengidentifikasi orang-orang yang rentan menjadi korban *human trafficking* (GRETA, 2019).

Hasil utama dari proyek ini adalah penelitian berjudul “*Adressing Human Trafficking on the Baltic Sea*”, rilis pada September 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun *human trafficking* bukan merupakan masalah yang signifikan di industry ferry di Laut Baltik, namun pencegahan *human trafficking* dan fenomena yang terkait merupakan elemen tanggung jawab sosial dari perusahaan ferry di Laut Baltik (GRETA, 2019).

3. Finlandia Government Action Plan Tahun 2016-2017

Hasil dari evaluasi pertama yang dilakukan GRETA salah satunya adalah mendesak Pemerintah Finlandia untuk mengadopsi *Action Plan* baru terkait dengan *human trafficking*, oleh karena itu Pemerintah Finlandia membentuk *Government Action Plan 2016-2017 anti-human trafficking* yang diadopsi oleh Kementerian Keamanan Kerja Dalam Negeri dan Administrasi pada 4 Oktober 2016. *Government Action Plan* ini merupakan bentuk implementasi yang dilakukan Finlandia terhadap *Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings* yang diratifikasi Finlandia pada tahun 2012.

Action plan ini mencakup sembilan langkah di berbagai bidang anti *human trafficking*. Sembilan langkah ini terbagi lagi menjadi 24 poin konkret. Setiap poin tersebut merupakan referensi dari *stakeholders* yang bertanggung jawab, di dalamnya

terdapat pencegahan *human trafficking*, perlindungan terhadap korban, dan tindakan yang terkait dengan membawa pelaku ke pengadilan, serta kerjasama dengan berbagai aktor. Area yang terkait kedalam *action plan* ini telah ditentukan, empat daerah yang memiliki kasus *human trafficking* terbanyak merupakan target dari *action plan* ini. *Action plan* ini akan dilaksanakan dibawah kerangka sumber daya keuangan yang tersedia, pemerintah Finlandia telah menyiapkan dana sekitar 500.000 Euro untuk pelaksanaan berbagai proyek yang berkaitan dengan *action plan* tersebut (Anitta Turkan, 2017).

Action Plan:

- a. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama nasional anti *human trafficking*.
- b. Meningkatkan efisiensi kerja dan identifikasi serta bantuan bagi korban *human trafficking*.
- c. Pemantauan peraturan perundang-undangan terkait bantuan bagi korban *human trafficking*.
- d. Deteksi *human trafficking* melalui cara yang resmi.
- e. Tindakan otoritas investigasi terhadap *human trafficking*.
- f. Meningkatkan efektivitas pelatihan dan kesadaran terhadap *human trafficking*.
- g. Meningkatkan kerjasama internasional anti *human trafficking*.
- h. Mengembangkan penelitian terkait *human trafficking*.
- i. Memperhatikan keadaan, kepentingan, dan haka nak-anak dalam memerangi tindak *human trafficking*.

4. Developing National Mental Health Policies for Refugees (PALOMA)

Pada tahun 2016, the *National for Health and Welfare* (THL) Finlandia bekerja sama dengan berbagai mitra penyedia layanan kesehatan mental membuat program yang bernama “*Developing National Mental Health Policies for Refugees*” sebagai upaya dalam mengatasi *human trafficking* yang terjadi di Finlandia. PALOMA merupakan program yang bertujuan dalam mengembangkan model nasional untuk kesehatan mental para pengungsi dan orang-orang dengan situasi yang sama, termasuk korban *human trafficking*. Target sasaran dari program ini adalah para pengungsi dan pencari suaka di Finlandia, hal ini dikarenakan mayoritas korban *human trafficking* di Finlandia merupakan para imigran termasuk para pengungsi dan pencari suaka, sehingga program ini dibuat dengan tujuan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan awal bagi orang-orang yang membutuhkan perawatan kesehatan fisik ataupun mental, dan mengidentifikasi orang-orang yang rentan menjadi korban *human trafficking* (Finnish Institute for Health and Welfare, 2022).

PALOMA juga akan memberikan perincian rekomendasi untuk identifikasi dan perawatan terhadap masalah kesehatan mental pengungsi, pencari suaka, dan tentunya korban *human trafficking*. Rekomendasi tersebut terdapat di dalam panduan layanan kesehatan mental bagi para pengungsi dan pencari suaka yang diterbitkan pada tahun 2018, termasuk bab tentang identifikasi korban *human trafficking* dan rujukannya ke layanan kesehatan mental dan bantuan lainnya. Panduan nasional ini terdiri dari 16 video dan satu paket materi, didalam video tersebut dijelaskan bagaimana fenomena yang berkaitan dengan pengungsi. Panduan ini diperuntukkan bagi para ahli, pelajar, dan sukarelawan. Materi yang tersedia diberikan secara gratis dan dapat digunakan secara bebas oleh lembaga pendidikan dan organisasi terkait lainnya (GRETA, 2018).

5. Kerjasama IOM dan Finlandia 2017-2018

Di tahun 2017 Pemerintahan Finlandia bersama dengan IOM melakukan survei *online* dengan tujuan untuk menilai tingkat kesadaran anti *human trafficking* terhadap layanan kesehatan profesional di Finlandia. Sebanyak 242 responden yang merupakan para tenaga kesehatan, terutama perawat. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 90% responden belum pernah menerima pelatihan anti *human trafficking*. Dengan hasil survei tersebut, maka terbentuklah kerjasama antara Pemerintah Finlandia dan IOM sebagai upaya mengatasi *human trafficking* di negaranya dengan menciptakan Proyek HOIKU (*Caring for Trafficked Person in Finland*) yang bertujuan untuk mengembangkan bimbingan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, penggiat sosial, dan para ahli dari berbagai *grass-root level organization* untuk dapat mengidentifikasi korban *human trafficking* serta memberikan bantuan kepada korban. Proyek ini diketuai oleh IOM dan didanai oleh pusat pendanaan untuk *Social Welfare and Health Organisations* (STEA). STEA merupakan pusat pendanaan yang independen, kewenangannya berhubungan dengan Kementerian Sosial dan Kesehatan, serta bertanggung jawab atas persiapan, pembayaran, pengawasan, dan mengevaluasi dampak dari dana yang telah diberikan (GRETA, 2019).

Uji coba panduan ini dilakukan di beberapa pusat layanan kesehatan untuk sebelumnya diluncurkan untuk penggunaan nasional pada Januari 2018. Panduan ini tentunya tersedia secara *online* dan pelatihannya akan dilakukan di setiap provinsi yang dimulai sejak musim semi-2018. Para tenaga kesehatan dan penggiat social di Helsinki, Tampere, Pieksämäki, dan Oulu telah melakukan pelatihan pada paruh pertama 2018, mereka dilatih untuk dapat mengidentifikasi dan memahami fenomena *human trafficking* dan pengaruhnya terhadap kesehatan serta kesejahteraan korban. Pelatihan akan fokus untuk mempersiapkan para penggiat sosial, dokter, dan perawat. Selain itu proyek ini secara tidak langsung mendukung serikat pekerja dokter dan perawat untuk menyampaikan informasi kepada para profesional di serikat pekerja mereka (GRETA, 2019).

6. Upaya Pencegahan Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 Pemerintah Finlandia terus menunjukkan upaya serius dan berkelanjutan dalam mencegah *human trafficking* yang terjadi di negaranya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan masalah *human trafficking* di negaranya. Upaya yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menyelidiki lebih banyak kasus *human trafficking*, serta membentuk unit anti *human trafficking* di kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, pemerintah Finlandia juga mengembangkan pedoman dan *checklist* untuk mengidentifikasi *human trafficking* pada tenaga kerja.

Selama tahun 2020, pemerintah Finlandia membentuk gugus tugas anti perdagangan manusia yang beranggotakan 20 orang dari anggota kepolisian Helsinki dan NBI (*National Bureau of Investigation*) untuk menyelidiki kasus *human trafficking* besar. Selanjutnya, kantor Kejaksaan Finlandia Selatan membentuk paralel unit anti *human trafficking* yang terdiri dari 10 jaksa khusus dan mengembangkan rencana untuk membuat *database* terperinci untuk semua kasus terkait *human trafficking*. Namun, dengan adanya pandemi *COVID-19* mengakibatkan pengadilan distrik ditutup, sehingga menyebabkan tertundanya proses peradilan, investigasi, dan penuntutan yang panjang. Finlandia Selatan, terkhusus Helsinki merupakan distrik terpadat sekaligus menjadi

lokasi utama dimana sering terjadinya kejahatan *human trafficking* (Daniel Kim dan Lamy Shawki, 2021).

Kesimpulan

Finlandia merupakan negara paling bahagia berdasarkan laporan *United Nations Sustainable Development Solutions Network*, selama empat tahun berturut-turut selalu berada di peringkat pertama. Berdasarkan tingkat kebahagiaan para migran pun Finlandia menempati peringkat kedua di tahun 2018. Namun, dengan predikat tersebut tidak menjamin negara tersebut terbebas dari masalah *human trafficking*, sejak tahun 2012-2020 angka kasus *human trafficking* di Finlandia selalu terjadi peningkatan. Dalam mengatasi *human trafficking* di negaranya tentunya Finlandia sudah melakukan beberapa upaya, seperti menandatangani *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings* di tahun 2006, lalu meratifikasi konvensi tersebut di tahun 2012. Dengan meratifikasi konvensi tersebut maka Finlandia wajib melakukan laporan atas pelaksanaan implementasi yang dilakukan oleh negaranya kepada GRETA yang merupakan badan yang tugasnya mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan implementasi dari konvensi tersebut. Di tahun 2015 GRETA melakukan evaluasi pertama dari implementasi yang dilakukan oleh Finlandia. Dari evaluasi tersebut GRETA menyarankan kepada pemerintah Finlandia untuk melakukan beberapa hal dalam memerangi *human trafficking* di negaranya.

Oleh karena itu berikut upaya-upaya yang dilakukan Finlandia dalam mengatasi *human trafficking* di negaranya, Finlandia melakukan amandemen terhadap *International Protection Act* di tahun 2015, kemudian ikut berpartisipasi dalam kerjasama regional di Laut Baltic tahun 2016, melaksanakan *Government Action Plan* tahun 2016-2017, membuat program *Developing National Mental Health Policies for Refugees* yang dikhususkan kepada pengungsi dan korban *human trafficking*, pemerintah Finlandia juga bekerja sama dengan IOM di tahun 2017-2018 untuk mengembangkan bimbingan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, penggiat sosial, dan profesional lainnya untuk dapat mengidentifikasi korban *human trafficking*, selanjutnya di tahun 2020 pemerintah Finlandia melakukan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, dan *NGO's* dalam mencegah terjadinya *human trafficking* di negaranya. Namun dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Finlandia tahun 2015-2020 dapat dikatakan belum berhasil dalam mengatasi *human trafficking* di negaranya, dikarenakan jumlah korban dari tahun 2015-2020 selalu mengalami peningkatan.

Daftar Pustaka

- Daniel Kim dan Lamya Shawki El-Shacke, *Trafficking in Persons Report*, (United State of America: The U.S. Department of State, 2021), 237, <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/>.
- F. Helliwell, John et al. *World Happiness Report 2018*. New York: Sustainable Development Solutions Network, 2018. https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf.
- Finnish Institute for Health and Welfare, “About THL”, 2022, <https://thl.fi/en/web/thlfi-en/about-us/about-thl>.
- Friesendorf, Cornelius. *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector*. Vienna: National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports, 2009.
- GRETA, *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Finland*. No. 9. France, 2015, <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680631bee>.
- GRETA. *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Finland*. No. 6. France, 2019. <https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/168094c77b>
- GRETA. *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Finland*. No. 2. France, 2018. <https://rm.coe.int/greta-2018-2-rq2-fin/168078b19b>.
- Ihmiskauppa. *Annual Overview of The Assistance System for Victims of Human trafficking Finland*. Finlandia, 2020, http://www.ihmiskauppa.fi/files/530/Annual_overview_of_the_Assistance_System_for_Victims_of_Human_Trafficking_Finland_1.1.-_31.12.2020.pdf.
- Ihmiskauppa. *Human trafficking in Finland*. Finlandia, 2017, https://www.ihmiskauppa.fi/en/human_trafficking/human_trafficking_in_finland.
- Madden, Duncen. “Ranked: The 10 Happiest Countries in The World In 2018”. *Forbes News*, 27 Maret 2018, <https://www.forbes.com/sites/duncanmadden/2018/03/27/ranked-the-10-happiest-countries-in-the-world-in-2018/?sh=d00eab773e91>.
- Türkan, Anitta, *Government Action Plan against Human Trafficking 2016–2017*. Helsinki: Ministry of the Interior Publication, 2017.